



Pedagang Merasa

Sambungan dari hal 1

Disperindag dulu, bukan langsung ke pedagang," tuturnya.

Rudi mengungkapkan, selama ini PT KAI selalu mengatasnamakan warga RW 03 Sosromenduran, Gedongtengen, Yogyakarta, yang menginginkan penataan PKL di wilayahnya. Warga di sana diiming-imingi menjadi kampung binaan PT KAI.

"Padahal saya ini juga warga RW 03. Aslinya di dalamnya jauh lebih kumuh, malah adaplus-plus," ujarnya.

Menurut Rudi, sekitar 80 pedagang yang tergabung dalam Paguyuban Manunggal Karsa tersebut selama ini mengantongi Kartu Bukti Pedagang (KBP) yang dikeluarkan Dinas Pengelolaan Pasar, yang sekarang menjadi Dinas Perindag. Ia juga mengaku bersama anggota paguyubannya telah mengadakan persoalan tersebut kepada DPRD Kota Yogyakarta.

Saat dikonfirmasi, Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Nasrul Khoiri, membenarkan adanya keluhan dari warga di sisi selatan stasiun Tugu Yogyakarta. Nasrul menilai SP II yang dilayangkan PT KAI ke pedagang tersebut ngawur karena salah alamat.

"Itu ngawur. Salah alamat. Seharusnya ditujukan

ke Disperindag Kota Yogyakarta. Karena pedagang ini resmi di bawah Disperindag Kota Yogyakarta, harusnya suratnya kesana," katanya.

Nasrul juga mengungkit terkait alas hak yang merupakan Sultan Ground yang diklaim oleh PT KAI Daop 6 Yogyakarta, juga perlu ditelusuri. "Perlu dicek dulu. KAI mengklaim dapat kekancingan, padahal sebelumnya dimanfaatkan Pemkot dan diberikan hak ke pedagang," kata politisi PKS itu.

Penegasan serupa juga disampaikan Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Sujanarko. Menurut dia Pemkot Yogyakarta harusnya bertanggung jawab melindungi pedagang resmi saat ada persoalan, seperti dengan PT KAI ini. Ia mengaku, tahun lalu sebenarnya DPRD Kota Yogyakarta sudah pernah memfasilitasi pertemuan pedagang dengan PT KAI Daop 6 maupun dengan Pemkot. Tapi, setelah pertemuan tersebut tidak diketahui kelanjutannya.

"Setelah itu kami belum pernah diajak berembung kembali hingga keluarnya SP I dari PT KAI," katanya.

Politisi PDIP itu menandakan akan mengambil keputusan tegas dengan menyurati PT KAI supaya tidak mengeluarkan surat peringatan lagi sebelum

ada pertemuan lagi dengan eksekutif dan legislatif. "Kami akan langsung buat suratnya," ujarnya.

Sebelumnya, Manager Humas PT KAI Daop 6 Jogja, Eko Budianto, mengungkapkan keberadaan pedagang di sisi selatan stasiun Tugu Jogja sudah dikoordinasikan dengan Pemkot. Meski demikian Eko belum memberikan keterangan terkait nilai tali asih ataupun besaran kompensasi ganti rugi kepada para pedagang.

Eko hanya menjelaskan saat ini PT KAI Daop 6 Yogyakarta sedang menyelesaikan pembangunan jalur pedestrian di selatan pintu keluar Stasiun Tugu Jogja, yang akan dijadikan percontohan pembangunan jalur pedestrian di sana. Jalur pedestrian yang dibuat selebar enam meter dan trotoar dibuat di dalam pagar, supaya tidak dimanfaatkan pedagang lagi. Diharapkan pada lebaran 2017 sudah selesai. (age)



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005